



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG

WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada jabatan lain yang memiliki fungsi strategis perlu ditetapkan nama jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan nama jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Kota Padang
5. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 130 TAHUN 2025
 TENTANG
 WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA

WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	WALI KOTA PADANG
		WAKIL WALIKOTA PADANG
		SEKRETARIS DAERAH
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
		STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
		STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN
		STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
		KEPALA BAGIAN HUKUM
		KEPALA BAGIAN KERJASAMA
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		KEPALA BAGIAN ORGANISASI
		KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		KEPALA BAGIAN UMUM
		AJUDAN WALI KOTA
		AJUDAN WAKIL WALI KOTA
		SESPRI WALI KOTA
		SESPRI WAKIL WALI KOTA

2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS
		KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SEKRETARIAT DPRD
		KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD
		KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEHUMASAN SEKRETARIAT DPRD
		KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT	INSPEKTUR
		SEKRETARIS
		IRBAN I
		IRBAN II
		IRBAN III
		IRBAN IV
		IRBAN KHUSUS
4	BADAN KESBANGPOL	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA
		SEKRETARIS

		KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
		KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA, DATA, DAN INFORMASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN, DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS USAHA KOPERASI KECIL DAN MENENGAH	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		KEPALA BIDANG FASILITASI DAN PEMBERDAYAAN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		KEPALA BIDANG PENGAWASAN KOPERASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
		KEPALA BIDANG KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

		KAWASAN PERMUKIMAN
		KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		KEPALA BIDANG KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
15	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN VOKASI, DAN PRODUKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KEPALA BIDANG SARANA,

		PRASARANA, DAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	DINAS SOSIAL	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
		KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
		KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
18	DINAS KESEHATAN KOTA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		SEKRETARIS
20	DINAS PERTANIAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN
		KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN
		KEPALA BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN
		KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN
		KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
		KEPALA BIDANG PENYULUHAN DINAS PERTANIAN
21	DINAS PERDAGANGAN	KEPALA

		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DINAS PERDAGANGAN
		KEPALA BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI DINAS PERDAGANGAN
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING DINAS PERDAGANGAN
		KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN DINAS PERDAGANGAN
22	DINAS PARIWISATA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PROGRAM DINAS PARIWISATA
		KEPALA BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA DINAS PARIWISATA
		KEPALA BIDANG PEMASARAN DINAS PARIWISATA
		KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		KEPALA BIDANG PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

		INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
		KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
29	DNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG GEDUNG DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENGAWASAN RUANG KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN	KEPALA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN
		KEPALA BAGIAN ADMINISTARSI UMUM DAN KEUANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS

		KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	DNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG GEDUNG DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENGAWASAN RUANG KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN	KEPALA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN
		KEPALA BAGIAN ADMINISTARSI UMUM DAN KEUANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

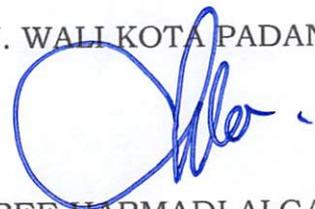
29	DNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG GEDUNG DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENGAWASAN RUANG KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN	KEPALA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENUNJANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
32	KECAMATAN PADANG SELATAN	CAMAT

		HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
25	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG OPERASI DAN SARANA PRASARANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		KEPALA BIDANG PROTEKSI DAN PENGUJIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
		KEPALA BIDANG ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
		KEPALA BIDANG PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN
		KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

		KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
29	DNAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG GEDUNG DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		KEPALA BIDANG PENGAWASAN RUANG KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA
		SEKRETARIS
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN	KEPALA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN
		KEPALA BAGIAN ADMINISTARSI UMUM DAN KEUANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UNIT

		ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
		KEPALA BIDANG PENUNJANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN
32	KECAMATAN PADANG SELATAN	CAMAT
		SEKRETARIS
33	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	CAMAT
		SEKRETARIS
34	KECAMATAN BUNGUS	CAMAT
		SEKRETARIS
35	KECAMATAN KOTO TANGAH	CAMAT
		SEKRETARIS
36	KECAMATAN PADANG UTARA	CAMAT
		SEKRETARIS
37	KECAMATAN PADANG TIMUR	CAMAT
		SEKRETARIS
38	KECAMATAN MANGGALO	CAMAT
		SEKRETARIS
39	KECAMATAN KURANJI	CAMAT
		SEKRETARIS
40	KECAMATAN PADANG BARAT	CAMAT
		SEKRETARIS
41	KECAMATAN PAUH	CAMAT
		SEKRETARIS
42	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	CAMAT
		SEKRETARIS

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR